

Bukti Submission Cosmogov

CosmoGov Journal Secretariat

[CosmoGov] Submission Acknowledgement

To: Sri Sutjiatmi



Sri Sutjiatmi

Thank you for submitting the manuscript, "Persepsi Masyarakat Terkait Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi perbandingan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal)" to CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/author/submission/26632>
Username: arifzainudin

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

CosmoGov Journal Secretariat
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

COSMOGOV
<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov>

Status

Status	Published	Vol 6, No 1 (2020)
Initiated	2020-05-20	
Last modified	2020-06-03	

Submission Metadata

Authors

Name	Sri Sutjiatmi
Affiliation	Universitas Pancasila Tegal
Country	Indonesia
Bio Statement	Program Studi Ilmu Pemerintahan
Name	Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Affiliation	Universitas Pancasila Tegal
Country	Indonesia
Bio Statement	Program Studi Ilmu Pemerintahan
Name	Arif Zainudin
ORCID ID	https://orcid.org/0000-0003-4038-9666
Affiliation	Universitas Pancasila Tegal
Country	Indonesia
Bio Statement	Program Studi Ilmu Pemerintahan
Principal contact for editorial correspondence.	

Title and Abstract

Title	PUBLIC PERCEPTION REGARDING MONEY POLITICS IN GENERAL ELECTION 2019 (COMPARTIVE STUDY ON TEGAL CITY AND TEGAL REGENCY)
Abstract	This paper is intended to look at the condition of Indonesia related to the still rampant occurrence of money politics which is a problem in the community when the 2019 elections simultaneously. This research takes a case study between Tegal City and Tegal Regency. The interesting thing in this study is to see how the community's assessment of the Tegal city and Tegal Regency groups regarding money politics in the 2019 elections simultaneously. The method used is a mixed method (between Mixed Methods) between quantitative and qualitative, by calculating the Solvin formula by deepening the analysis by interviewing the speakers directly. The results of the study showed that the people of Tegal City had a relatively high attitude of not paying attention to the Politics of Money in the General Election relating to the political money of the General Elections in 2019 at the same time. Unlike the people of Tegal Regency who consider money politics as a culture that is difficult to remove. Also interesting is the beginner voter group Tegal Regency has a fairly high knowledge about money politics that can damage the democratic system compared to the Beginner voters in Tegal City.

Indexing

Keywords	Comparison of Perception; Money Politics; Elections
Language	en

Supporting Agencies

Agencies	—
----------	---

Review Stage

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

Submission

Authors Sri Sutjiatmi, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, Arif Zainudin 

Title PUBLIC PERCEPTION REGARDING MONEY POLITICS IN GENERAL ELECTION 2019 (COMPARTIVE STUDY ON TEGAL CITY AND TEGAL REGENCY)

Section

Editor Idil Akbar 

Peer Review

Round 1

Review Version [26632-83050-2-RV.DOCX](#) 2020-03-28

Initiated 2020-03-28

Last modified 2020-05-02

Uploaded file Reviewer A [26632-83619-1-RV.DOCX](#) 2020-03-29

Editor Decision

Decision [Accept Submission](#) 2020-05-02

Notify Editor  [Editor/Author Email Record](#)  2020-05-02

Editor Version [26632-83589-1-ED.DOCX](#) 2020-03-28

Author Version [26632-85242-1-ED.DOCX](#) 2020-04-22 [DELETE](#)

Upload Author Version

no file selected

00172536

[View My Stats](#)



Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

Persepsi Masyarakat Terkait Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi perbandingan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal)

Submitted:, Reviewed:, Published:

ABSTRACT

This paper is intended to look at the condition of Indonesia related to the still rampant occurrence of money politics which is a problem in the community when the 2019 elections simultaneously. This research takes a case study between Tegal City and Tegal Regency. The interesting thing in this study is to see how the community's assessment of the Tegal city and Tegal Regency groups regarding money politics in the 2019 elections simultaneously. The method used is a mixed method (between Mixed Methods) between quantitative and qualitative, by calculating the Solvin formula by deepening the analysis by interviewing the speakers directly. The results of the study showed that the people of Tegal City had a relatively high attitude of not paying attention to the Politics of Money in the General Election relating to the political money of the General Elections in 2019 at the same time. Unlike the people of Tegal Regency who consider money politics as a culture that is difficult to remove. Also interesting is the beginner voter group Tegal Regency has a fairly high knowledge about money politics that can damage the democratic system compared to the Beginner voters in Tegal City.

Keywords: Comparison of Perception, Money Politics, Elections

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat kondisi Indonesia terkait masih maraknya terjadi politik uang yang menjadi masalah ditengah masyarakat saat pemilu serentak 2019. Penelitian ini mengambil studi kasus antara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Hal menarik dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana perbandingan persepsi masyarakat berdasarkan kelompok usia antara masyarakat kota Tegal dan Kabupaten Tegal perihal politik uang pada pemilu serentak 2019 yang lalu. Metode yang digunakan adalah metode campuran (*Mixed Method*) antara kuantitatif dan kualitatif, dengan pendekatan rumus solvin dengan pendalaman analisis dengan wawancara dengan narasumber secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tegal memiliki sikap ketidakpedulian yang cukup tinggi mengenai Politik Uang dalam Pemilu meskipun mereka mengetahui terkait beredarnya politik uang saat Pemilu serentak 2019 yang lalu. Berbeda dengan masyarakat Kabupaten Tegal yang mereka menganggap politik uang sebagai Budaya yang ada yang sulit dihilangkan. Selain itu yang menarik adalah kelompok pemilih pemula Kabupaten Tegal memiliki pengetahuan yang cukup tinggi mengenai bahaya politik uang yang dapat merusak system demokrasi dibandingkan pemilih Pemula yang ada di Kota Tegal.

Keywords: Perbandingan Persepsi, Politik Uang, Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu bentuk wujud berjalannya Demokrasi yang baik dalam suatu Negara yang menganut system Demokrasi itu sendiri. Demokrasi merupakan konsep atau perangkat

kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasar-kan kehendak suara rakyat mayoritas (Nurtjahyo, 2006).

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting sebagai wujud kedaulatan rakyat demi menghasilkan pemerintahan yang

Commented [ND1]: Naskah ini menarik dan cukup baik dalam penulisan, harap di sesuaikan sedikit.

Commented [ND2]: Pendahuluan sudah cukup baik dengan berbagai macam literatur terdahulu yang baik.

Commented [ND3]: rakyat

demokratis, selain itu juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah karena dipilih langsung oleh rakyat. Karena rakyat yang terlibat secara aktif dan langsung dalam menentukan arah kebijakan politik dalam suatu negara untuk satu periode kepemimpinan kedepannya, maka pemilu bisa dianggap sebagai salah satu pondasi demokrasi. Pemilu dilakukan agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan (Arrsa, 2014).

Saat ini berjalannya demokrasi secara umum lebih dapat diterima keberadaannya dibandingkan dengan sistem yang otoriter. Suatu sistem dan penerapan pemilu yang berlandaskan jujur dan adil merupakan landasan bagi sistem demokrasi yang baik. Untuk memastikan kelancaran proses pemilu, hal utama yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangan mengenai pemilu itu sendiri.

Kehidupan demokrasi tidak akan pernah terlepas dari partai politik sebagai wadah aspirasi dan wadah tempat berjuang para kader terbaik bangsa yang menginginkan perbaikan kehidupan yang lebih baik lagi. Namun, kenyataan yang mengkhawatirkan ialah bahwa sebagian besar Parpoltersangkut dengan dugaan politik uang pada masa Pemilu dan Pilkada (Kumorotomo, 2009). Hal tersebut sudah tidak lagi menjadi rahasia umum yang mana politik uang dan partai politik memiliki hubungan yang cukup erat.

Kurangnya pemahaman mengenai pondasi dan substansi demokrasi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia melihat

demokrasi sekadar sebagai ritual (pemilu, pemungutan suara, voting, kebebasanber pendapat, dan sebagainya) sedangkan relevansinya terhadap perbaikan kualitas kebijakan publik cenderung diabaikan (Zen, 2015).

Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya sebagai anggota dewan menjadi salah satu faktor yang menghambat terjadinya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Masyarakat banyak yang merasakan bahwa wakilnya hanya banyak mengumbar janji dan saat realitasnya sangat sedikit direalisasikan.

Permasalahan politik uang sudah tidak asing lagi terdengar dalam masyarakat biasa saat ini, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak memenangkan pemilihan. Sering juga terdengar berbagai upaya yang dilakukan oleh kandidat untuk memenangkan pertarungan. Semuanya dianggap sebagai fenomena yang biasa terjadi dan berkembang dalam masyarakat (Qodir, 2014).

Sangat miris sejatinya kalau mendengar perihal pelanggaran pemilu yang sering terjadi saat pemilu berlangsung. Masyarakat yang saat ini seakan-akan sudah puas dengan apa yang didapatkan sesaat oleh para oknum tersebut. Sudah menjadi hal yang biasa dalam setiap pemilu berlangsung aka nada permasalahan politik uang yang muncul.

Salah satu alasan logis dibalik praktek politik uang yang masiv bertautan erat dengan tipe pemilih

mengambang (*floating mass*) yang pragmatis (Sihidi et al., 2019). Pemilih yang mengambang menjadi sasaran utama beredarnya politik uang, karena kondisi tersebut selalu dimanfaatkan oleh oknum untuk mampu menggiring para pemilih untuk mau memilih sesuai dengan keinginan oknum penyebar politik uang. Dibutuhkan pendidikan politik yang baik dari masyarakat dalam melawan hal tersebut yang selalu terjadi pada kontestasi pemilu maupun pilkada.

Sistem pemilu secara langsung yang dilakukan oleh Negara Indonesia saat ini memiliki cita tersendiri terutama pasca reformasi seperti saat sekarang ini. Dimulai dengan Pemilu Tahun 2004, 2009, dan 2014 memiliki catatan sejarah tersendiri mengingat pemilu tersebut adalah pemilu yang demokratis dalam sejarah Bangsa Indonesia karena rakyat dapat memilih secara langsung wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlemen berikut presiden serta wakil presiden.

Untuk Pemilu serentak 2019 dikenal dengan pemilu yang paling rumit di dunia karena adanya beberapa tahapan pemilihan yang harus dilakukan yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota barulah kemudian melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden (Dewi, 2015).

Setiap perjalanan Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia pasca reformasi memiliki catatan tersendiri terutama terkait pelanggaran yang

salah satunya adalah *money politik* atau politik uang. Politik uang diartikan sebagai bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang atau kelompok bai supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun agar tidak melaksanakan haknya dalam pemilihan umum, dan pebelian bisa dilaksanakan atau dilakukan dalam bentuk uang atau barang.

Setiap perjalanan Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia pasca reformasi memiliki catatan tersendiri terutama terkait pelanggaran yang salah satunya adalah *money politik* atau politik uang. Politik uang diartikan sebagai bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang atau kelompok bai supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun agar tidak melaksanakan haknya dalam pemilihan umum, dan pebelian bisa dilaksanakan atau dilakukan dalam bentuk uang atau barang.

Pada kondisi saat ini politik uang menjadi salah satu racun demokrasi yang harus diberantas oleh siapapun. Sejatinnya racun demokrasi ada berbagai bentuk yang selalu berkembang saat perhelatan pemilu, diantaranya; (1) Politik uang/money politic, (2) Kampanye Hitam/Black Campaign, (3) Kampanye mengandung SARA, (4) Berita bohong/Hoax, (5) Golput.

Hal tersebut sangat jelas, bahwa memang politik uang menjadi salah satu masalah serius yang harus dihadapi setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Untuk lebih jelasnya beberapa kasus serta laporan politik

uang yang terjadi pada pemilu pasca reformasi dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Laporan Politik Uang saat Pemilu Pasca Reformasi

NO	Tahun Pemilu	Kasus	Tempat	Temuan
1	2004	114 kasus ditemukan terkait Politik uang anggota Dewan (Data dari ICW).	Tersebar di beberapa daerah Indonesia.	Pemberian dalam bentuk uang, barang dan sejenis kupon.
2	2009	150 kasus politik uang pada 4 kota Besar, (Data dari ICW).	Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makasar	Pemberian dalam bentuk uang, barang.
3	2014	313 kasus politik uang ditemukan pada pemilu 2014 (Data dari ICW).	Tersebar di 5 provinsi yang ada di Indonesia.	Pemberian dalam bentuk uang, barang, pemberian jasa, penggunaan sumberdaya negara.
4	2019	4 orang Operasi Tangkap Tangan di Kota Pekanbaru (laporan kompas.com)	Di Kota Pekanbaru	Uang sebesar Rp 506.400.000 sedang diedarkan.

Sumber : data diolah peneliti 2020

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa memang politik uang menjadi permasalahan yang serius dalam perhelatan akbar pesta demokrasi masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut juga didukung oleh perilaku masyarakat Indonesia yang masih primitif atau rendahnya pendidikan masyarakat mengenai politik uang sehingga kenyataannya masih ada juga yang menawarkan suaranya untuk dibeli.

Padahal kondisi tersebut akan merusak citra demorasi itu sendiri disetiap negara. Maka dari itu menjadi menarik diteliti mengenai pandangan

masyarakat terhadap politik uang yang selalu terjadi saat pemilu. Karena memang jika praktek politik uang ini tidak segera diselesaikan dan diberantas maka akan muncul lagi masalah akuntabilitas dan representasi demokrasi karena politik uang di Indonesia jelas merusak akuntabilitas proses pengambilan kebijakan, baik itu di eksekutif maupun legislatif (Muhtadi, 2013).

Praktik politik uang dalam pemilihan biasanya dilakukan oleh *expert* agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan *lay* agen yaitu pemilih selain tim sukses. Adapun cara

yang dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada expertagen dan lay agen berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik (Amanu, 2015).

Politik uang merupakan media transaksional bagi kandidat dan pemilih untuk saling menguntungkan dalam pemilu atau suksesi kepemimpinan lainnya. Kondisi yang saling menguntungkan tersebut justru membuat nilai-nilai demokrasi dalam pemilu menjadi luntur karena dengan uang mencederai kejujuran, sportifitas persaingan serta menimbulkan persaingan yang tidak adil bagi calon-calon lain (Lukmajati, 2016).

Demokrasi sejatinya adalah menjadi pesta setiap masyarakat yang ada, baik di tingkat Desa maupun masyarakat Kota sekalipun. Semua berhak merayakan pesta tersebut tanda adanya intervensi politik uang sekalipun. Meskipun demikian, secara pendekatan sosiologi sudah ada jelas perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat Desa dalam melakukan pendekatan perihal apapun, termasuk dalam menghadapi politik uang.

Masyarakat Desa erat kehidupannya dengan yang berhubungan dengan alam, serta masih sangat patuh terhadap keyakinan yang dianutnya dengan tingkat religiusitas yang cukup tinggi dengan mengedepankan gotongroyong (Jamaludin, 2017).

Berbanding terbaik dengan masyarakat perkotaan seperti yang (Jamaludin, 2017) katakan bahwa masyarakat perkotaan anggota-anggotanya terpisah-pisah, saling tidak kenal, dan saling terikat kontak kekeluargaan dan hubungannya serba lugas. Jadi terdapat perbedaan masyarakat Kota dan Desa dalam melakukan pendekatan dalam sesuatu hal dalam kehidupan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Perihal tersebut juga akan mempengaruhi masyarakat dalam menghadapi politik uang yang selama ini juga bermasalah di masyarakat kota dan masyarakat Desa.

Maka dari itu penelitian ini akan melihat bagaimana perbandingan persepsi masyarakat Kota Tegal dengan masyarakat Kabupaten Tegal dalam memandang permasalahan politik uang berdasarkan Usia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Mixed Methods*. *Mixed methods* merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang sudah ada yaitu diantaranya kualitatif dan kuantitatif.

Menurut (Creswell, 2010 : 5) penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.

Strategi *mixed methods* yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi metode campuran sekuensial/bertahap. Strategi ini dapat dilakukan dengan interview terlebih dahulu

Commented [ND4]: pilihan metode yang baik dalam studi komparasi, namun jika lebih tajam di tambahkan dengan karakteristik dari mixed method seperti dalam riset ini apa saja yang menjadi karakteristik dalam menggunakan kualitatif maupun kuantitatif sehingga metode menjadi lebih rinci dalam kaitannya dengan penelitian ini.

untuk mendapatkan data kualitatif, allu diikuti dengan data kuantitatif dalam hal ini menggunakan kuesioner (Creswell, 2010 : 316-318).

Populasi dalam tulisan ini adalah seluruh masyarakat Kota Tegal dan Kabupaten Tegal yang telah masuk daftar pemilih tetap pada pemilu serentak 2019 dan ditentukan sample sebanyak 200 responden yang ditentukan menggunakan pendekatan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 2011).

Teknik analisis data kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS dalam pengolahan data crosstab/tabulasi silang yang akan menghubungkan antar beberapa variable.

HASIL DAN DISKUSI

Politik uang dalam pergeleran pemilu ataupun Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia sudah bukan menjadi hal yang baru saat ini. Politik uang menjadi permasalahan serius yang harus ditangani oelh setiap masyarakat

Dibutuhkan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam hal untuk melawan politik uang tersebut. Kondisi saat ini banyak persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa politik uang tersebut hal yang biasa teradi di tengah masyarakat, baik ditingkat kota maupun Desa. Dalam hal ini terutama adalah masyarakat Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.

Table 2
Informasi Politik Uang oleh masyarakat Kabupaten Tegal

Usia	Sangat Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui
------	-------------------	------------	------------------

	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui
17-30 tahun	0	22	2
31-45 Tahun	2	18	6
46-60 Tahun	2	12	12
60 Tahun Keatas	2	6	16
Total	6	58	36

Data diolah SPSS, 2020

Dapat dilihat pada table 2 perihal sejauh mana info yang didapat oleh masyarakat Kab. Tegal mengenai politik uang saat pemilu 2019 yang lalu bahwa dari kelompok usia manapun mereka sejatinya mengetahui perihal adanya politik uang yang beredar sebesar 58% dari responden kabupaten Tegal. Dan yang menjawab sangat tahu adalah sebanyak 6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten memang benar-benar mengetahui bahwa adanya politik uang saat pemilu serentak 2019 lalu.

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kota Tegal yang mengatakan mereka mengetahui perihat adanya sebaran politik uang yang ada di Kota Tegal sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat pada table 3 dibawah ini

Tabel 3
Informasi Politik Uang oleh masyarakat Kabupaten Tegal

Usia	Sangat Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Sangat Tidak Mengetahui
17-30 Tahun	6	10	10	2
31-45 Tahun	2	18	8	0
46-60 Tahun	0	16	8	2
60 Tahun Keatas	0	8	10	0
Total	8	52	36	4

Data diolah SPSS, 2020

Dapat dilihat pada table 3 bahwa memang masyarakat Kota Tegal tidak berbeda dengan masyarakat Kabupaten tegal perihal informasi yang didapat

Commented [ND5]: Hasil dan diskusi bisa di ikuti dengan sub bab sub bab untuk membuat analisa per point view terlihat bagian-bagian analisa

terkait beredarnya politik uang saat pemilu 2019 kemarin. Hal tersebut dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat mengetahui dan mengetahui terkait adanya politik uang sebanyak 60% yang artinya lebih dari setengah responden yang mengetahui terkait adanya politik uang saat pemilu serentak 2019.

Hanya 40% masyarakat yang menjawab dengan jawaban tidak mengetahui dan sangat tidak mengetahui.

Ada catatan yang menarik sejatinya yang dapat terlihat, bahwa ternyata untuk kelompok millennial atau usia yang kisaran 17-30 tahun yang banyak mendapatkan informasi mengenai politik uang yang beredar. Artinya bahwa memang anak mudanya cukup aktif dalam menerima informasi yang ada disekitarnya pada saat pemilu serentak berlangsung.

Selanjutnya adalah melihat bagaimana masyarakat berdasarkan kelompok usia memberikan respon terhadap banyaknya isu politik uang saat pemilu serentak 2019 berlangsung tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4 dibawah ini;

Tabel 4
Respon Masyarakat Kota Tegal Terkait Adanya Politik Uang Saat Pemilu Serentak 2019

Usia	Membiar kan saja	Ikut Menikma ti	Sudah menjadi budaya	Melapo rkan
17-30 Tahun	8	4	4	12
31-45 Tahun	6	2	14	6
46-60 Tahun	14	4	2	6
60 Tahun Keatas	8	4	6	0
Total	36	14	26	24

Data diolah SPSS, 2020

Table 4 diatas merupakan hasil dari tanggapan masyarakat Kota Tegal perihal mengetahui informasi terkait Politik uang yang ada di tengah-tengah

masyarakat. Dapat terlihat secara umum masyarakat kota Tegal sangat antipasti dengan politik uang yang ada, mereka menjawab dengan jawaban membiarkan saja politik uang itu terjadi dengan persentase 36%. Artinya bahwa memang ada garis lurus antara gaya hidup masyarakat di Kota yang lebih cenderung tidak peduli dengan apa yang terjadi disekitar.

Hal tersebut juga terjadi terhadap permasalahan politik uang yang ada saat pemilu serentak berlangsung dan masyarakat kota Tegal lebih kepada mengambil sikap dengan membiarkan saja. Meskipun demikian kelompok millennial yang usianya 17-30 tahun juga termasuk kelompok yang menikmati politik uang yang beredar saat pemilu serentak yang lalu.

Di kota Tegal ternyata pendidikan politik dan kesadaran politik pemilih millennial cukup tinggi dengan ditunjukkan bahwa mereka meskipun banyak yang tau perihal politik uang namun kesadaran mereka cukup tinggi untuk hal yang perlu dilakukan saat mengetahui politik uang. Melaporkan kepada pihak yang berwajib merupakan sikap yang diambil oleh pemilih milenial saat mengetahui politik uang masih ada bertebaran ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai pembanding kondisi masyarakat yang berada di Kabupaten Tegal perihal sikap yang ditunjukkan saata mengetahui politik uang dapat dilihat pada table 5 dibawah ini;

Tabel 5
Respon Masyarakat Kabupaten Tegal Terkait Adanya Politik Uang Saat Pemilu Serentak 2019

Usia	Membiar kan saja	Ikut Menikma ti	Sudah menjadi budaya	Melapo rkan
17-30 Tahun	6	4	12	2
31-45	10	0	12	4

Tahun 46-60	4	0	8	14
Tahun 60	8	2	4	8
Tahun Keatas	28	6	36	28

Data diolah SPSS, 2020

Pada table 5 diatas dapat dilihat perbedaan masyarakat Kota Tegal dengan Kabupaten Bantul yang mana di Kabupaten Tegal yang memiliki kecenderungan masyarakat Desa dalam kehidupan sehari-hari. Di kabupaten Tegal masyarakat sudah menganggap Politik uang pada saat pemilu itu menjadi hal yang biasa dn menjadi budaya. Artinya adalah politik uang pada pemilu sejak dahulu sudah ada saat pemilu berlangsung baik di tingkat desa, dalam pemilihan kepala Desa maupun ditingkat daerah yang juga memilih kepala daerah.

Terlihat dalam table tersebut masyarakat kabupaten Tegal secara umum mengannnggap bahwa politik uang tersebut sudah menjadi budaya dengan responden menjawab sebesar 36%. Namun ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal yaitu perihal sikap oleh pemilih millennial.

Pemilih millennial lebih cenderung masih rendah kesadaran politik yang dimilikinya perihal sikap dalam mendapatkan informasi terkait politik uang. Pemilih millennial masih sangat minim memiliki kesadaran untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, mereka juga menganggap bahwa politik uang menjadi budaya yang ada saat pemilu berlangsung pada tingkatan manapun.

Hal tersebut sebenarnya akan menjadi miris melihat bahwa sejatinya tonggak demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini terletak pada kesadaran politik pemilih

millennial yang nantinya akan menggantikan kepemimpinan masa depan. Pemilih millennial tidak seharusnya pesimis dengan perihal yang ada, karena sejatinya kelompok millennial harus mampu melawan segala bentuk permasalahan yang ada dalam bangsa ini termasuk politik uang tersebut yang menjadi permasalahan dalam demokrasi.

Semua kelompok usia sejatinya memiliki tanggung jawab yang tinggi perihal pendidikan politik. Pendidikan politik yang baik akan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam berjalannya demokrasi yang ada di Indonesia.

Masyarakat juga dituntut untuk aktif melawan segala bentuk pelanggaran pemilu yang ada. Saat ini yang menjadi masalah adalah sejauh mana masyarakat bisa memahami dan mengerti apa saja yang masuk dalam pelanggaran pemilu. Table 6 akan menunjukkan mengenai pemahaman masyarakat terkait politik uang yang termasuk dalam pelanggaran pemilu;

Tabel 6
Pemahaman Masyarakat Kota Tegal Perihal Politik Uang Yang Masuk Dalam Pelanggaran Pemilu

Usia	Sangat Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Sangat Tidak Mengetahui
17-30 Tahun	4	22	2	0
31-45 Tahun	2	18	8	0
46-60 Tahun	0	14	12	0
60 Tahun Keatas	0	2	16	2
Total	6	56	38	2

Data diolah SPSS, 2020

Table 6 menunjukkan seberapa tingginya pemahaman masyarakat

perihal politik uang yang masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu. Masyarakat Kota Tegal secara umum dari kelompok usia menunjukkan bahwa mereka cukup mengerti dan paham bahwa politik uang termasuk salah satu pelanggaran pemilu dengan ditunjukkan dengan jawaban responden sebanyak 62%.

Ada temuan yang menarik terkait hal ini mengenai masyarakat Kota Tegal dengan kelompok usia sebagai pemilih millennial mereka pada umumnya yang paling mengerti dan paham terkait politik uang yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Sedangkan kelompok usia yang dengan umur 46 tahun keatas mereka cukup banyak yang tidak mengetahui bahwa politik uang tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran pemilu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kota Tegal yang masuk dalam kategori kelompok Millennial yang sebelumnya menganggap bahwa politik uang itu hal yang biasa, namun sejatinya mereka mengetahui bahwa hal tersebut masuk dalam kategori pelanggaran pemilu.

Sebagai pembandingan table 7 akan menunjukkan hal yang sama perihal pemahaman masyarakat Kabupaten Tegal yang mengetahui bahwa politik uang masuk dalam kategori pelanggaran pemilu;

Tabel 7
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Tegal
Perihal Politik Uang Yang Masuk Dalam
Pelanggaran Pemilu

Usia	Sangat Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Sangat Tidak Mengetahui
17-30 Tahun	2	22	0	0
31-45 Tahun	6	20	0	0
46-60 Tahun	12	12	2	0

60 Tahun Keatas	4	6	10	4
Total	24	60	12	4

Data diolah SPSS, 2020

Masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam pemahaman sesuatu hal. Pendidikan mampu mempengaruhi bagaimana pemahaman mengenai sesuatu hal. Pemahaman mengenai pelanggaran pemilu masyarakat Kabupaten Tegal cukup tinggi dengan ditunjukkan dari jawaban responden sebesar 84% yang menjawab dengan jawaban mengetahui dan sangat mengetahui bahwa politik uang tersebut masuk dalam kategori Pelanggaran Pemilu.

Pemahaman tersebut membuktikan bahwa meskipun masyarakat menganggap politik uang sudah menjadi budaya dalam setiap pemilu, namun mereka paham bahwa politik uang itu termasuk dalam pelanggaran pemilu. Pemahaman masyarakat masih belum sepenuhnya mampu memberikan dampak dan memerangi politik uang yang ada pada setiap Pemilu berlangsung. Dibutuhkan aksi nyata bersama dalam melawan politik uang.

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kota Tegal, ternyata masyarakat Kabupaten Tegal dengan kelompok usia pemilih millennial yang paling banyak memahami dan mengerti bahwa politik uang tersebut masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. Kelompok usia yang masuk dalam rentan usia 46 tahun ternyata masih ada yang belum mengerti bahwa politik uang tersebut masuk dalam kategori pelanggaran pemilu yang bisa merusak demokrasi.

Politik uang menjadi penghalang dalam berjalannya demokrasi yang baik dalam suatu Negara. Para calon pemimpin tidak memiliki kesempatan

yang sama untuk menjadi seorang pemimpin di negeri sendiri. Hal tersebut akan berlangsung secara terus menerus dan hanya akan menguntungkan para pemilik modal saja.

Pendidikan politik yang baik dapat dilihat salah satunya dengan tingkat pemahaman akan bahayanya politik uang yang selalu menjadi permasalahan saat pemilu serentak 2019 berlangsung. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada masyarakat Kota Tegal pada table 6 dibawah ini;

Tabel 8
Pemahaman Masyarakat Kota Tegal Perihal Bahaya Politik Uang dalam Kehidupan Berdemokrasi

Usia	Sangat Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Sangat Tidak Mengetahui
17-30 Tahun	0	24	4	0
31-45 Tahun	2	14	12	0
46-60 Tahun	0	12	14	0
60 Tahun Keatas	0	4	10	4
Total	2	54	40	4

Data diolah SPSS, 2020

Untuk masyarakat kota Tegal dapat terlihat pada table 8 perihal pemahaman masyarakat terkait bahayanya politik uang dalam kehidupan berdemokrasi. Masyarakat Kota Tegal memiliki sebanyak 56% memiliki pemahaman yang cukup tinggi tentang bahayanya politik uang yang beredar saat pemilu serentak 2019 kemarin. Namun ternyata masih ada kelompok masyarakat Kota Tegal yang masih belum mengetahui dampak yang ada karena politik uang. Sebanyak 46% responden yang menjawab mereka tidak mengetahui perihal bahaya politik uang yang terjadi.

Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Kota Tegal masih belum

cukup tinggi pendidikan politik terutama terkait politik uang. Menjadi tugas bersama bahwasanya masyarakat memiliki hak terkait pemahaman tentang bahayanya politik uang, agar politik uang tidak menjadi budaya lagi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi dalam bentuk Pemilu.

Sebagai pembandingan bisa dilihat table 9 perihal pemahaman masyarakat Kabupaten Tegal tentang bahayanya politik uang dibawah ini;

Tabel 9
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Tegal Perihal Bahaya Politik Uang dalam Kehidupan Berdemokrasi

Usia	Sangat Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Sangat Tidak Mengetahui
17-30 Tahun	2	16	6	0
31-45 Tahun	2	18	6	0
46-60 Tahun	4	22	0	0
60 Tahun Keatas	2	10	10	2
Total	10	66	22	2

Data diolah SPSS, 2020

Table 9 menunjukkan bahwa cukup tingginya pemahaman masyarakat Kabupaten Tegal terkait bahaya politik uang yang bisa merusak system demokrasi yang berlangsung di Negara ini. Masyarakat Kabupaten Tegal menjawab dengan jawaban sangat mengetahui dan mengetahui perihal bahayanya politik uang sebesar 76% dan hanya 24% mereka yang tidak mengetahui terkait bahayanya politik uang yang beredar saat pemilu.

Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi antara masyarakat Kota Tegal dengan masyarakat Kabupaten Tegal yang mana masyarakat Kabupaten Tegal memiliki pemahaman yang cukup tinggi terutama perihal bahaya politik

uang yang akan berdampak cukup besar dalam kehidupan berdemokrasi.

Hal tersebut berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat yang masih perlu ditingkatkan untuk masyarakat Kota Tegal. Terbukti bahwa adanya korelasi masyarakat yang tidak yang tidak merespon terkait persebaran politik uang atau membiarkan saja dengan masih rendahnya pendidikan politik terkait bahayanya politik uang.

Berbeda dengan masyarakat Kota Tegal, masyarakat Kabupaten Tegal yang menganggap bahwa politik uang pada saat pemilu itu sudah menjadi budaya dan hal yang lumrah ternyata memiliki pemahaman tentang bahaya politik uang itu sendiri dalam kehidupan berdemokrasi.

KESIMPULAN

Kehidupan berdemokrasi menuntut adanya penyelenggaraan Pemilu dalam suatu Negara secara berkala dengan tujuan adanya sirkulasi kepemimpinan yang baik sehingga mempermudah mencapai cita-cita dalam mensejahterakan masyarakat.

Pemilu yang baik adalah pemilu yang berlangsung tanpa adanya pelanggaran yang terjadi yang sejatinya akan merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Politik uang merupakan salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam setiap pemilu berlangsung. Politik uang tidak bisa dilawan jika hanya menyerahkan tanggungjawab tersebut kepada aparat yang berwajib. Karena dibutuhkan suatu upaya bersama dalam melawan dan memberantas politik uang tersebut.

Persepsi masyarakat harus diperbaiki kembali mengenai politik uang yang ada saat pemilu berlangsung. Maka dari itu kesimpulan yang dapat diambil perihal

perbandingan persepsi masyarakat kota Tegal dan Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- 1) Masyarakat Kota Tegal tidak begitu peduli dengan permasalahan politik uang yang ada. Mereka lebih cenderung membiarkan saja meskipun mengetahui adanya Politik uang pada pemilu serentak 2019 yang lalu.
- 2) Masyarakat Kabupaten Tegal sudah menganggap politik uang adalah sebagai budaya yang tidak bisa dihilangkan.
- 3) Kelompok pemilih pemula masyarakat Kabupaten Tegal memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi dibandingkan pemilih pemula masyarakat Kota Tegal perihal bahaya politik uang dan politik uang yang masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanu, M. (2015). *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)* Mohamad Amanu 105120101111019.
- Arrsa, R. C. (2014). *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*. (169).
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, S. (2015). SIKAP DAN PEMAKNAN PEREMPUAN MARGINAL TERHADAP POLITIK UANG: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kudus. *Addin*, 9(1), 205–228.
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi perkotaan (Memahami masyarakat Kota dan*

- Problematikanya* (ke-2). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kumorotomo, W. (2009). *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan kebijakan Publik Setelah Pilkada Berlangsung. Konferensi Administrasi Negara*, (32), 1–18.
- Lukmajati, D. (2016). *Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)*. 7(1), 1–24.
- Muhtadi, B. (2013). *Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 369. Retrieved from <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/217>
- Nurtjahyo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qodir, Z. (2014). *Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 39–54.
- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., Romadhan, A. A., Pemerintahan, D. I., Malang, U. M., & Malang, K. (2019). *RELASI POLITIK UANG DAN PARTY-ID DI INDONESIA*. (2), 204–220.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zen, H. (2015). *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah. Al-'Adalah*, 12(3), 525–540.

Idil Akbar

[CosmoGov] Editor Decision

To: Arif Zainudin, Cc: Sri Sutjiatmi, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo



Sri Sutjiatmi

We have reached a decision regarding your submission to CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, "Persepsi Masyarakat Terkait Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi perbandingan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal)".

Our decision is to: Article Need Revision

Idil Akbar
Scopus ID: 57205339454, University of Padjadjaran
Phone 085228063186
idil.akbar@gmail.com

Reviewer A:

Naskah ini menarik dan cukup baik dalam penulisan, harap di sesuaikan sedikit.

Reviewer B:

Abstract (Abstrak):

- Topik yang menarik, namun makalah ini perlu direvisi agar lebih baik lagi.

Agar tujuan penelitian dipertajam, tujuan penelitian harusnya bukan hanya sekedar melihat kondisi Indonesia terkait masih maraknya terjadi politik uang....., tapi perlu dipertajam apa yang ingin dicapai dari penelitian ini dalam mengatasi masalah yang ada saat ini (problem statement) atau memberikan tambahan informasi mengenai implikasi dari penelitian ini baik terhadap teori atau praktik.

- Agar ditambah dengan kesimpulan termasuk makna dari hasil penelitian atau rekomendasi dari penelitian. Berdasarkan hasil perbandingan kedua yurisdiksi apa maknanya terhadap politik uang atau politik. Dengan kata lain, makna dari hasil komparasi kedua lokus penelitian dijelaskan.

Introduction (Pendahuluan):

- Perlu ditambahkan riset terbaru di politik uang
- Perlu ditambahkan alasan/motivasi melakukan penelitian ini
- Dikarenakan ini adalah studi perbandingan, dijelaskan alasan pemilihan kedua lokus (Kota dan Kabupaten Tegal) dan dijelaskan ringkas konteks di kedua lokus penelitian itu.

- TABEL

- o Pada tabel 1 cukup bagus namun perlu ditambahkan sumber yang jelas, bukan sekedar data diolah peneliti. Misalnya data dari ICW itu tahun berapa bisa ditambahkan dalam daftar pustaka atau di bawah tabel, termasuk laporan dari kompas.com agar dimasukkan dalam daftar pustaka, diunduh tanggal berapa
- o Pada tabel 2, heading tabel tidak lengkap, agar dilengkapi
- o Untuk memperjelas bahwa angka-angka dalam persentase, maka dalam heading tabel perlu ditambahkan penjelasan dalam persentase
- o Tabel 2 hanya 3 indikator (mengetahui,, mengetahui()), sedangkan tabel 3 ada 4 indikator (sangat mengetahui, mengetahui, tidak mengetahui, sangat tidak mengetahui). Agar bisa diperbandingkan, tabel 2 dan 3 agar disamakan indikatornya.

Material and/or Research Method:

- Makalah ini belum secara jelas mengutarakan tujuan dari penelitian dan implikasinya bagi teori atau praktik. Dalam pendahuluan, tujuan hanya tercantum begitu ringkas namun belum jelas yaitu : Maka dari itu penelitian ini akan melihat bagaimana perbandingan persepsi masyarakat Kota Tegal dengan masyarakat Kabupaten Tegal dalam memandang permasalahan politik uang berdasarkan Usia.
- Penelitian tidak cukup hanya melihat perbandingan tapi apa sebenarnya yang ingin diperoleh dari perbandingan itu. Maka tujuan penelitian dan kesimpulan perlu dipertajam.

Result and Discussion (Hasil dan Pembahasan):

- Agar dijelaskan lebih detail mengenai analisis kuantitatif dan kualitatif (misalnya kualitatif menggunakan wawancara kepada berapa orang di masing-masing lokus?, begitu juga metode kuantitatif apa yang digunakan. Dalam makalah hanya dijelaskan metode pengambilan sampling teknik slovin, agar dijelaskan lebih detail metode pengumpulan dan analisis data.
- Jelaskan variable-variabel apa yang akan diukur.
- Kejelasan dalam metode penelitian diperlukan untuk meningkatkan kualitas artikel/makalah dan kemungkinan replikasi.

Literature Cited (Kepustakaan):

Cara penulisan agar dikonsistenkan dengan template

Structure the Article (Struktur Artikel):

sesuai dengan template

Language (Tata Bahasa):

Perlu perbaikan masih banyak typos, dan spasi, dan italics untuk bahasa asing perlu disesuaikan
Ada paragraph yang berulang : setiap perjalanan pemilu.....

Conclusion (Kesimpulan):

Kesimpulan tidak sekedar mengulang hasil riset namun ditambahkan makna hasil dimaksud atau implikasi dari hasil penelitian terhadap praktik atau teori.

Recommendation (Rekomendasi):

Perlu ditambahkan rekomendasi

Notes (Catatan-Catatan):

-

Bukti LoA

Idil Akbar

[CosmoGov] Editor Decision

To: Arif Zainudin, Cc: Sri Sutjiatmi, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo



Sri Sutjiatmi

We have reached a decision regarding your submission to CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, "Persepsi Masyarakat Terkait Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi perbandingan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal)".

Our decision is to: Article Accepted

Idil Akbar

Scopus ID: 57205339454, University of Padjadjaran

Phone 085228063186

idil.akbar@gmail.com

COSMOGOV

<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov>